

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika, Tahun 2010

Bakhrul Amal, *Pengantar Hukum Tanah Nasional, Sejarah, Politik dan Perkembangannya*, Yogyakarta, Thafa Media, Tahun 2017

Boedi Harsono, 2005, *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya*, Jakarta, Djambatan,

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, Jakarta, Djambatan, Tahun 2000

Boedi Harsono, *Sengketa-sengketa Tanah Serta Penanggulangannya*, Jakarta, Tahun 2005

Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari Hukum dan Memahami Hukum*, Tahun 2010

Dr. Elisabeth Nurhaini Butar-butar, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta 2018

Dr. Urip Santoso, S.H., M.H. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*

Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta : Muhammadiyah University

Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Tahun 2009

John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair

Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000,

Maria Soemardjono dan Puspita Serangkum, *Aneka Masalah Hukum Agraria*, Yogyakarta, Andi Offset, Tahun 1982

Mr. B. Ter Haar Bzn. (*Beginnelsen en stelsel van het Adat-recht*)
terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto – Penerbit Negara Pradyana
Pramita d / h I.R. Walters Jakarta,

Muhammad Arifin, *Teori dan filsafat hukum dan problematika keadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Natalia Runtuwene, "Pemberian Ganti Rugi terhadap Penguasaan Tanah tanpa Hak"

Otje Salman dan Anthon Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditma, Jakarta,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada media, jakarta 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Tahun 2008

Purnama T. Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Bandung, Mandar Maju, Tahun 2008

Salim HS, *Jaminan di Perkembangan Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2004

Soekanto Soerjono dan Sri Mamdji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, Tahun 2001

Soemitro Rochmat, *Peraturan dan Intruksi Lelang*, Bandung, Eresco, Tahun 1987

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta, Tahun 1989

Supriadi, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta, 2007

Supriadi, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta, Tahun 2007

Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Tahun 2000

Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Prenadamedia Group, Tahun 201

Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*

i. Jurnal dan Seminar

Edo Setiawan, “Hak katas Tanah”, <http://Digilib.Ac.Id/203001/13/BAB%2011.Pdf> Diakses pada tanggal 6 Jaanuari 2023

Hukum Perdata, Pengertian Hak Tanggungan Definisi Unsur Sifat Subjek dan Objek serta Tahap Pembebanan, Hukum Undang-Undang. <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertianhak-haktanggungan-definini.html>

Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, tahun 1999

Moh. Mahmud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara, Seminar Nasional ”Saatnya Hati Nurani Bicara” diselenggarakan Oleh DPP Partai HANURA, Jakarta, 8 Januari 2009

a. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan